

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Revisi Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Revisi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014–2018 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 yaitu

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, misi Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan

3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah

Revisi Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 ini dilakukan dikarenakan perubahan kelembagaan karena Bappeda saat ini selain mengalami perubahan nama juga terjadi penambahan bidang yang sebelumnya terdapat 3 bidang dan saat ini menjadi 4 bidang sehingga otomatis terjadi penambahan program dan kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

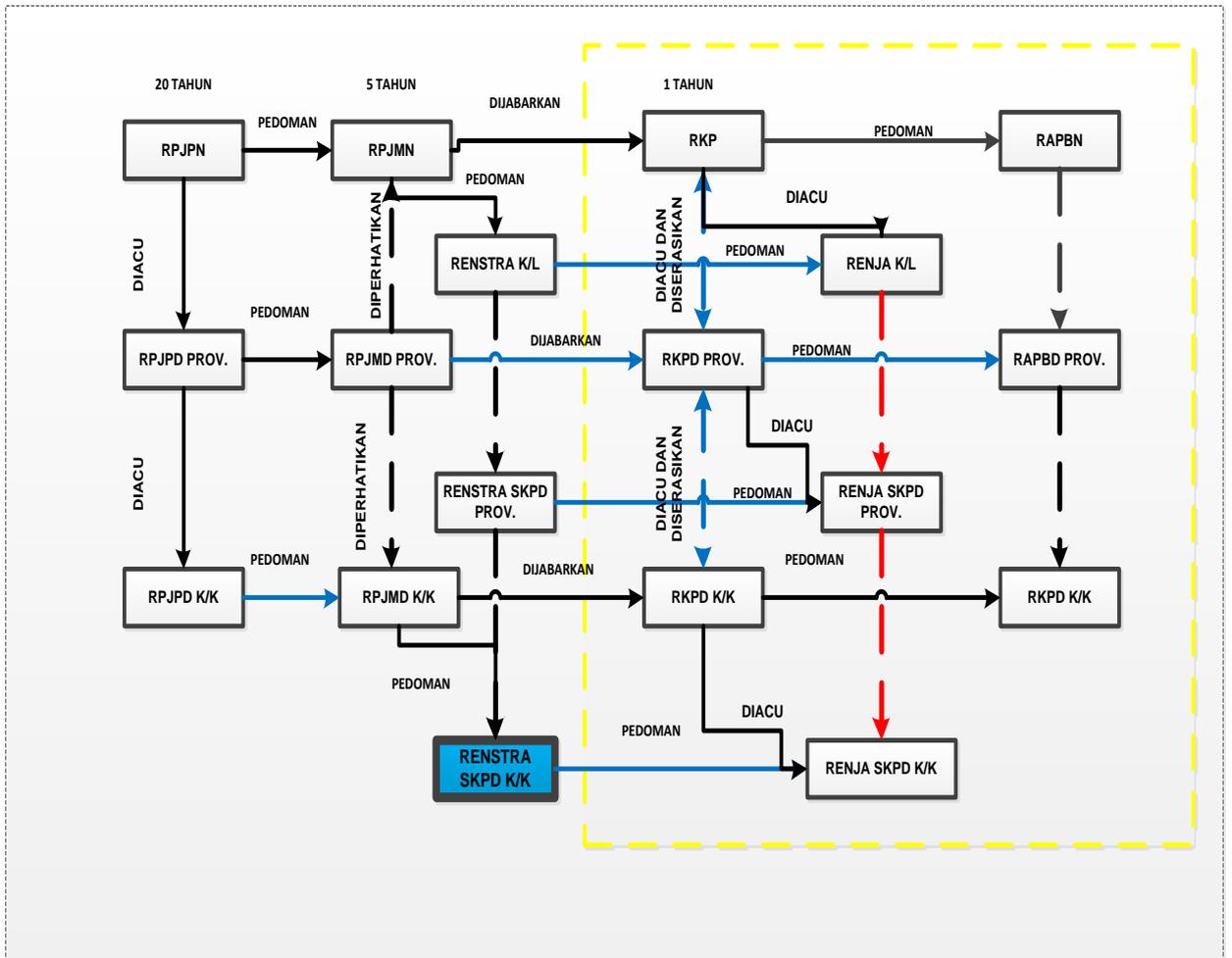
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD

Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusam rancangan renja SKPD
- b. Tahap penyajian rancangan renja SKPD

Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
- n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor 32);
- o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);
- p. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 – 2018.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Revisi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Revisi Rencana Kerja Bappeda adalah:

1. Acuan Bappeda dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2017 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2016.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan

dalam SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan tentang usul program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

3.2. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Revisi Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappeda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

Anggaran Tahun 2017 Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 3.539.698.000,- (termasuk perubahan) dengan 12 program dan 35 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.377.584.680,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 93,84% dan capaian kinerja keuangan sebesar 67,17 %, beberapa kegiatan tidak terlaksana 100 % diakibatkan proses administari dan keterbatasan waktu dan anggaran.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun

sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk tahun anggaran 2018 setelah terbentuknya kelembagaan baru anggaran sebesar Rp. 4.646.336.000, terdapat 17 program 47 kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2017, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*Pengarah*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi bagi Badan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.

- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapaiannya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan pencapaian Renstra Tahun 2017 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2017 s.d Triwulan II 2018 menggambarkan target kinerja renstra,realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dan realisasi inerja sampai triwulan II tahun 2017.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016 berdasarkan pada indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

- Tingkat Penggunaan data/informasi untuk perencanaan dan pembangunan.
- Terjalannya koordinasi dalam kerjasama pembangunan daerah.
- Terwujudnya kebijakan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Keikutsertaan aparat perencana dalam meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah.
- Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD,Renja SKPD dan RKPD) sesuai kalender,sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi.
- Tingkat kinerja perencanaan pembangunan ekonomi.
- Tingkat kinerja perencanaan social budaya.
- Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri.
- Tingkat kesehatan masyarakat desa dan kelurahan.
- Tersedianya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin.
- Tersedianya dokumen rencana tata ruang wilayah.
- Terlaksananya sosialisasi Perda RTRW.

- Terpenuhinya SPM bidang penataan ruang.

Berikut dikemukakan juga beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda sebagai berikut :

- a. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan;
- b. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan daerah;
- c. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
- d. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang akan dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- e. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang di laksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Subag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subag Perencanaan
 - c. Subag Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
 - a. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya yang terdiri dari Sub Bidang Ekonomi & SDA, Sub Bidang Sosial dan Sub Bidang Budaya
 - b. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang terdiri dari Sub Bidang Pekerjaan Umum, Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi & Informatika dan Sub Bidang Pengembangan Wilayah.

- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- d. Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Makro, Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional

dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hal ini bertujuan untuk merreview kembali apakah usulan program dan kegiatan yang telah tertuang pada rancangan awal renja sudah sesuai dan sinkron dengan rancangan Awal RKPD karena dimungkinkan dalam penyusunan rancangan awal renja memungkinkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun tersebut maka kegiatan tersebut dapat diprogramkan/dimasukkan didokumen rancangan RKPD dan selanjutnya dapat menjadi kegiatan pada periode RKPD.

Setelah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan renja, maka dijelaskan bahwa Renja Bappeda Rahun 2016 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2016.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan usulan yang dihasilkan pada pelaksanaan Musrenbang dan reses Anggota DPRD dibahas dan dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam astu forum dengan mempertimbangkan urgensi, efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan berdasarkan budang koordinasi.

Sebgaimana tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai fungsi koordinasi terhadap proses perencanaan pembangunan maka dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tidak mendapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat baik melalui pelaksanaan Musrenbang maupun hasil reses Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 :

USULAN PROGRAM & KEGIATAN TAHUN 2016
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB
SIDRAP

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Nihil				

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappeda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu

6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah. Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2014–2018, seperti Visi dan misi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang dijelaskan pada Bab. I diatas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014–2018 adalah sebagai berikut :

Sasaran	Tujuan	Indikator
Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan	Keselarasan perencanaan pembangunan

berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholders		
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi perencanaan yang berkualitas dan akuntabel serta menjaga konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan	Tercapainya Konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan
	Meningkatnya partisipasi seluruh stakeholders dalam perencanaan pembangunan	Tingkat partisipasi dalam perencanaan pembangunan
Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	
	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar	
Menyediakan dan mengelola data/informasi, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan data dan informasi	Kemudahan mengakses data dan informasi

Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak	Terselenggaranya bimbingan teknis untuk peningkatan SDM Perencana	Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak
---	--	--

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja 2017

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai “*pengarah*” setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 – 2018 yaitu “ **TERWUJUDNYASIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMAMASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT**”, dan

sesuai dengan Visi Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 – 2018 yaitu **“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, Partisipatif dan Akuntabel untuk Mendorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”**, maka program dan kegiatan yang dirancang Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 terdiri dari :

Program/Kegiatan Bappeda Tahun 2018

Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya ATK, Materai, Perangko dan benda pos lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon tiap bulannya
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Terbayarnya biaya perizinan kendaraan dinas operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honor, uang lembur, ATK, barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terbayarnya upah pihak ketiga dan tersedianya peralatan kebersihan
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat-alat listrik dan terbayarnya upah pihak ketiga
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terbayarnya belanja perjalanan dinas dalam daerah
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honor, belanja ATK, cetak, penggandaan, makan minum harian, rapat, tamu dan upah/jasa pihak ketiga
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya penataan halaman gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
Pengadaan Peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
Pengadaan Meubelur	Tersedianya meubelur kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharannya gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Meubleur	Terpeliharannya Meubleur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan
Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah
Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan SDM	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan dan SDM
Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan
Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersedianya laporan fisik dan keuangan program kegiatan pelaksanaan APBD Kabupaten
Pengintegrsian sisti informasi pembangunan daerah (SDDKN)	Terlaksanya SIPD dan SDDKN
Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Terjalannya Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah Daerah
Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin
Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya Program Pembangunan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)
Pengembangan sistim inovasi daerah	Tersusunnya data infrmasi potensi dan inovasi daerah
Peningkatan kapasitas data publikasi riset dan teknologi	Tersedianya data/informasi pembangunan bidang kelitbanan
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terlaksananya koordinasi bidang infrastruktur dan program-program pendampingan

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersusunnya dokumenn memorandum program sektor sanitasi
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Keikutsertaan aparat perencana meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunandaerah(RPJPD,RPJMD,Rens tra SKPD, Renja SKPD, dan RKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD. Kabupaten, propinsi dan nasional
Penetapan RKPD	Terlaksananya penyusunan rancangan/draft akhir RKPD dan penetapan RKPD
Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Terlaksananya montoring dan evaluasi
Penetapan (Revisi) RPJMD	Tersusunnya RPJMD tahun 2014-2018
Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok
Koordinasi penusunan data DAK.APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi	Tersedianya laporan monev DAK.APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi
Pelaksanaan asistensii RKA dan RKAP	Terlaksananya asistensii RKA dan RKAP
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TKPKD
Program Perencanaan Sosial Budaya	Tingkat kinerja Perencanaan Sosial Budaya
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang sosial
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri
Operasional Pendamping WISMP	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif

Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Perencanaan Tata Ruang
Revisi Rencana Tata Ruang Eilayah	Tersusunnya Dokumen Revisi RTRW
Program Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pada tabel rencana program & kegiatan pada perubahan renja bappeda tahun 2017, pada tabel tersebut digambarkan terdapat kolom program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan dan pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan.

BAB IV

P E N U T U P

Revisi Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Revisi Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Revisi Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi npelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappeda Kabupaten

Rencana Program & Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018

KODE	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)											Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019		Jenis Kegiatan	Perangkat Daerah/P Jawab		
				Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif				
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Belanja Tidak Langsung			ASN Lingkup Bappeda	ASN Lingkup Bappeda	Pangsid	Pangsid					3,963,136,000	4,045,594,000	82,458,000				4,247,873,700		
	Belanja Pegawai											3,963,136,000	4,045,594,000	82,458,000				4,247,873,700		
	Belanja Langsung											4,646,336,000	4,646,336,000	-				4,878,652,800		
1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran	ASN Lingkup Bappeda	ASN Lingkup Bappeda	Pangsid	Pangsid				1,173,253,000	1,179,863,000	6,610,000	APBD	APBD		1,238,856,150	a	Bappeda
	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	Tertibnya admnistari persuratan								1400	1400	6,600,000	6,600,000	-	APBD	APBD	1400	6,930,000
	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sda & listrik	Terbayarnya rekening listrik,air dan telepon tiap bulannya								12	12	75,600,000	75,600,000	-	APBD	APBD	12	79,380,000
	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jaminan barang milik daerah	Terbayarnya asuransi kendaraan dinas roda empat								12	12	33,114,000	33,114,000	-	APBD	APBD	12	34,769,700
	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Terbayarnya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas Operasional								23	23	14,700,000	14,700,000	-	APBD	APBD	23	15,435,000
	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu Penyediaan administrasi jasa adm keuangan	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan								12	12	182,697,000	182,697,000	-	APBD	APBD	12	191,831,850
	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kenyamanan dan kebersihan kantor								12	12	27,696,000	27,696,000	-	APBD	APBD	12	29,080,800
	09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja diperbaiki	Penyediaan JasaPerbaikan Peralayan Kerja								36	36	18,900,000	18,900,000	-	APBD	APBD	36	19,845,000
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor								75	75	4,154,000	4,154,000	-	APBD	APBD	75	4,361,700
	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah								70	70	289,784,000	289,784,000	-	APBD	APBD	70	304,273,200

	19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah					20	20	3,000,000	3,000,000	-	APBD	APBD	20	3,150,000		
	20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	terbayarnya honor belanja ATK, cetak, pengadaan makan minum harian, rapat, tamu dan upah jasa pihak ketiga	Terbayarnya honor, belanja ATK, cetak, penggantian, makan minum harian, rapat, tamu dan upah/jasa pihak ketiga					12	12	517,008,000	523,618,000	6,610,000	APBD	APBD	12	549,798,900		
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	ASN Lingkup Bappeda	ASN Lingkup Bappeda	Pangsid	Pangsid			321,082,000	302,082,000	(19,000,000)	APBD	APBD		317,186,100	a	Bappeda
	03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Tersedianya gedung kantor					1	1	4,071,000	4,071,000	-	APBD	APBD	1	4,274,550		
	09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor					21	21	-	20,000,000	20,000,000	APBD	APBD	21	21,000,000		
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					1	1	100,461,000	100,461,000	-	APBD	APBD	1	105,484,050		
	24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional					23	23	216,550,000	177,550,000	(39,000,000)	APBD	APBD	23	186,427,500		
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan yang dipelihara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor					5				-	APBD	APBD		-		
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan yang dipelihara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor					17	0			-	APBD	APBD	0	-		
	29	Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	Jumlah dan jenis meubeleur yang dipelihara rutin/berkala	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubeleur					5				-	APBD	APBD		-		
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keikutsertaan aparat perencanaan meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Keikutsertaan aparat perencanaan meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	ASN Lingkup Bappeda	ASN Lingkup Bappeda	Pangsid	Pangsid	100	100	-	-	-	APBD	APBD	100	-	a	Bappeda
	03	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan					10			-	-	APBD			-		

4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Presentase capaian kinerja keuangan	Presentase capaian kinerja keuangan	ASN Lingkup Bappeda	ASN Lingkup Bappeda	Pangsid	Pangsid	100	100	47,111,000	47,111,000	-	APBD	APBD	100	49,466,550	a	Bappeda	
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKJIP, Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD	Terlaksananya penyusunan Laporan kinerja instansi pemerintah dan dokumen perencanaan bappeda					5	5	28,173,000	28,173,000	-	APBD	APBD	5	29,581,650			
	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan					2	2	18,938,000	18,938,000	-	APBD	APBD	2	19,884,900			
	03	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran					1				-		APBD			-		
5	15	Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Terlaksananya Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	ASN Lingkup Bappeda	ASN Lingkup Bappeda	Pangsid	Pangsid			111,306,000	111,306,000	-	APBD	APBD		116,871,300	c	Bappeda, SKPD Lingkup Pemda	
	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM	Terwujudnya peningkatan SDM dan pemerintahan yang baik					1	1	56,186,000	56,186,000	-	APBD	APBD	1	58,995,300			
	02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan	Tersusunnya data/ Informasi kelitbanan bidang sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan					1	1	55,120,000	55,120,000	-	APBD	APBD	1	57,876,000			
6	15	Program Pengembangan data dan Informasi	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan	Tingkat penggunaan Data/ Informasi untuk perencanaan & pembangunan	PemKab	PemKab	Pangsid	Pangsid			55,252,000	55,252,000	-	APBD	APBD		58,014,600	b	Bappeda, SKPD Lingkup Pemda	
	01	Pengeumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Prgram & Kegiatan	Tersusunnya laporan pengendalian evaluasi rkpdp tahun 2019	Terlaksananya pengendalian evaluasi dokumen perencanaan tahunan secara berkala					4	4	32,038,000	32,038,000	-	APBD	APBD	4	33,639,900			
	11	Pengintegrasian Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan SDDKN	Tersedianya aplikasi sistem informasi pembangunan daerah & SDDKN	Tersedianya basis pembangunan dalam aplikasi SIPD & SDDKN					1	1	23,214,000	23,214,000	-	APBD	APBD	1	24,374,700			
7	16	Program Kerjasama Pembangunan	Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah	Terjalannya Koordinasi dalam Kerjasama Pembangunan Daerah	ASN & Stakeholder	ASN & Stakeholder	Pangsid	Pangsid			15,617,000	15,617,000	-	APBD	APBD		16,397,850	b	Bappeda, SKPD Lingkup Pemda	

	04	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Tersusunnya RAD dan pelaporan berbasis sistem PPK	Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan					4	4	15,617,000	15,617,000	-	APBD	APBD	4	16,397,850		
8	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin	Tersedianya sarana&prasarana air minum&sanitasi yang layak bagi masyarakat miskin	Masyarakat Desa/Kel	Masyarakat Desa/Kel		Pangsid	Pangsid		37,750,000	37,750,000	-	APBD	APBD		39,637,500	b	Bappeda,SKPD Lingkup Pemda
	02	Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Tersedianya akses air minum & sanitasi	Akses ketersediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat					4	4	37,750,000	37,750,000	-	APBD	APBD	4	39,637,500		
	16	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Terlaksananya Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	PemKab	PemKab		Pangsid	Pangsid		463,144,000	435,030,000	407,852,000	APBD	APBD		456,781,500	c	Bappeda,SKPD Lingkup Pemda
9	01	Pengembangan Sistim Inovasi Daerah	Tersusunnya Data Informasi Potensi & Inovasi Daerah	Tersusunnya Data Informasi Potensi & Inovasi Daerah					1	1	435,966,000	407,852,000	407,852,000	APBD	APBD	1	428,244,600		
	02	Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Risert & Teknologi	Terlaksananya peningatan data dan publikasi risert dan teknologi	Tersedianya data informasi pembangunann bidang kelitbanan					1	1	27,178,000	27,178,000	-	APBD	APBD	1	28,536,900		
10	18	Program Perencanaan Pembangunan Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya Kebijakan Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	PemKab	PemKab		Pangsid	Pangsid		197,656,000	222,270,000	24,614,000	APBD	APBD		233,383,500	b	Bappeda,SKPD Lingkup Pemda
	06	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD	Tersusunnya Dokumen KLHS RPJMD					1	1	117,891,000	138,423,000	20,532,000	APBD	APBD	1	145,344,150		
		Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW	Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW	Tersusunnya Dokumen KLHS RTRW					1	1	79,765,000	83,847,000	4,082,000	APBD	APBD	1	88,039,350		
11	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Masyarakat Desa/Kel	Masyarakat Desa/Kel		Pangsid	Pangsid		136,202,000	169,702,000	33,500,000	APBD	APBD		178,187,100	b	Bappeda,SKPD Lingkup Pemda
	12	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	Terwujudnya koordinasi dan monev bidang infrastruktur	Ketersedian data terkait infrastruktur					12	12	73,170,000	126,670,000	53,500,000	APBD	APBD	12	133,003,500		

	15	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersediannya dokumen pemutakhiran strategi sanitasi kota	Perencanaan sanitasi 5 tahun dan sinkronisasi data keciptakaryaan				2	2	63,032,000	43,032,000	(20,000,000)	APBD	APBD	2	45,183,600		
12		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah	Keikutsertaan aparat perencanaan meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	Keikutsertaan aparat perencanaan meningkatkan kapasitas dalam sosialisasi kebijakan dan bimbingan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah			Pangsid	Pangsid			-	-	APBD	APBD		-	b	Bappeda
	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana						5					APBD	APBD		-		
13	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, dan RKKPD) sesuai kalender, sesuai dengan penetapan dan isinya sesuai regulasi			Pangsid	Pangsid		763,155,000	799,045,000	35,890,000	APBD	APBD		838,997,250	b	Bappeda, SKPD Lingkup Pemda dan Stakeholder
	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKKPD	Terlaksananya musrenbang desa/kel,kec, Kab,prov dan pusat	Terlaksananya musrenbang desa/kel,kec, Kab,prov dan pusat	Masyarakat Desa/Kel	Masyarakat Desa/Kel		4	4	174,783,000	154,522,000	(20,261,000)	APBD	APBD	4	162,248,100		
	10	Penetapan RKKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)	PemKab	PemKab		2	2	112,890,000	112,890,000	-	APBD	APBD	2	118,534,500		
	18	Rancangan RPJMD	Dokumen Ranwali RPJMD	Tersusunnya dok ranwal RPJMD	PemKab,Stak eholder	PemKab,Stak eholder		1	1	123,078,000	187,263,000	64,185,000		APBD	1	196,626,150		
	13	Monitoring Evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monev	Terlaksananya Monev	PemKab,Stak eholder	PemKab,Stak eholder		4	4	48,421,000	48,421,000	-		APBD	4	50,842,050		
	20	Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	PemKab,Stak eholder	PemKab,Stak eholder		2	2	166,940,000	158,906,000	(8,034,000)	APBD	APBD	2	166,851,300		
	19	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok	PemKab,Stak eholder	PemKab,Stak eholder		2	2	21,705,000	21,705,000	-	APBD	APBD	2	22,790,250		
	21	Koordinasi penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	Tersedianya Laporan Monev Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	Tersedianya Laporan Monev Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi	PemKab,Stak eholder	PemKab,Stak eholder		4	4	71,224,000	71,224,000	-	APBD	APBD	4	74,785,200		

	22	Pelaksanaan Asistensi RKA dan RKAP	Terlaksananya Asistensi RKA dan RKAP	Terlaksananya Asistensi RKA dan RKAP	PemKab,SKP D	PemKab,SKP D			2	2	44,114,000	44,114,000	-	APBD	APBD	2	46,319,700		
14	22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi	Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi			Pangsid	Pangsid			333,033,000	333,033,000	-	APBD	APBD		349,684,650		Bappeda,SKP D Lingkup Pemda dan Staheholder
	04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi	Pemkab,Stakeholder	Pemkab,Stakeholder			12	12	45,357,000	45,357,000	-	APBD	APBD	12	47,624,850		
	11	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersedianya laporan TPKD	Tersedianya laporan TPKD	Masyarakat Desa/Kel	Masyarakat Desa/Kel			12	12	287,676,000	287,676,000	-	APBD	APBD	12	302,059,800		
15	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya	Program Perencanaan Sosial Budaya			Pangsid	Pangsid			100,176,000	100,176,000	-	APBD	APBD		105,184,800		Bappeda,SKP D Lingkup Pemda dan Staheholder
	03	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	PemKab,Stakeholder	PemKab,Stakeholder			12	12	73,380,000	73,380,000	-	APBD	APBD	12	77,049,000		
	08	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	PemKab,Stakeholder	PemKab,Stakeholder			12	12	26796000	26796000	-	APBD	APBD	12	28,135,800		
16	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri	Masyarakat Desa/Kel	Masyarakat Desa/Kel	Pangsid	Pangsid			278,175,000	224,675,000	(53,500,000)	APBD	APBD		235,908,750		Bappeda,SKP D Lingkup Pemda dan Staheholder
	04	Operasional IPDMIP	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif					1	1	278,175,000	224,675,000	(53,500,000)	APBD	APBD	1	235,908,750		
19	33	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah			Pangsid	Pangsid			560,300,000	560,300,000	-	APBD	APBD		588,315,000	c	Bappeda,SKP D Lingkup Pemda dan Staheholder
	11	Revisi RTRW	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	PemKab	PemKab			1	1	560,300,000	560,300,000	-	APBD	APBD	1	588,315,000		
17	33	Program Prima Kesehatan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan	Tingkat Kesehatan Masyarakat Desa&Kelurahan	Masyarakat Desa/Kel	Masyarakat Desa/Kel	Pangsid	Pangsid			53,124,000	53,124,000	-	APBD	APBD		55,780,200	b	Bappeda,SKP D Lingkup Pemda dan Staheholder
	01	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat					12	12	53,124,000	53,124,000	-	APBD	APBD	12	55,780,200		
JUMLAH											4,646,336,000	4,646,336,000	-				4,878,652,800		